



**TANGGAPAN/JAWABAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
ATAS PANDANGAN FRAKSI TERHADAP RAPERDA USUL PRAKARSA
BADAN PEMBENTUKAN PERDA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Disampaikan Oleh : DENNY SEPTIVIAN, SH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Ykh. Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ykh. Segenap jajaran OPD Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, insan pers, dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat serta Karunia-nya kepada kita, sehingga kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan salahsatu agendanya Tanggapan/Jawan Pengusul (Bapemperda) terhadap Pemandangan Umum Fraksi .

Hadirin yang saya hormati,

Menanggapi Pandangan Fraksi atas Penjelasan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengenai Penyampaian Raperda Usul Prakarsa Badan pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka kami Badan pembentukan Perda berpendapat :

1. Menyampaikan terima kasih atas semua masukan dan saran dari semua Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, semoga hasil ini dapat berjalan

maksimal untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Jawa Tengah.

2. Beberapa masukan terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dari semua Fraksi, maka secara jelas kami memberikan tanggapan diantaranya :**

- a. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah salah satu langkah untuk percepatan dan kemajuan pembangunan, dengan memberikan kepastian hukum terhadap proses pembentukan produk hukum di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Setelah disahkannya Perda ini maka Pemerintah memegang peranan penting dalam kualitas proses penyusunan produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota maupun proses penyusunan Produk Hukum yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu terus mengantisipasi dan menyiapkan diri untuk menjaga kualitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Produk Hukum.
- d. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah mengatur di dalam penyusunan *produk hukum di lingkungan DPRD*.
- e. Dalam perda ini belum Menyusun tentang pedoman penyusunan Produk Hukum Desa, karena berdasarkan kewenangan Pembinaan Desa Merupakan Tugas Kab/Kota.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian Tanggapan/Jawaban Bapemperda Atas Pandangan Fraksi terhadap Raperda Usul Prakarsa Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selanjutnya kami mengharap kepada peserta Rapat Paripurna Dewan untuk memberikan persetujuan terhadap Raperda ini, menjadi Raperda Usul Prakarsa DPRD.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Mei 2023

**BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
Ketua,**

ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN